



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

NADIA YULIANI
NIM. 11675202166

PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NADIA YULIANI
 NIM : 11675202166
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM
 KELUARGA HARAPAN (PKH) DESA
 PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR
 KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI

Pembimbing

RUSDI, S.Sos., MA

NIP. 19720906 200712 1 004

MENGETAHUI

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Drs. H. Muh Said HM. M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan
 Ilmu Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : NADIA YULIANI
 NIM : 11675202166
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM
 KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA
 PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR
 KABUPATEN KAMPAR
 HARI / TANGGAL UJIAN : SENIN, 28 DESEMBER 2020

PANITIA PENGUJI

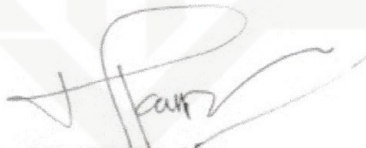
KETUA


Dr. KAMARUDDIN, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

PENGUJI I


MUSLIM, S.Sos, M.Si
 NIP. 19820205 201503 1 002

PENGUJI II


MASHURI, MA.
 NIP. 19770721 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Nadia Yuliani

Email : Nadiayuliani937@gmail.com

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Coast Transfer) yang digagas oleh pemerintah pusat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dalam upaya membangun sistem pemberdayaan masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan PKH di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung kelapangan, wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan dan mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH kurang transparan karena dalam sosialisasi nya tidak melibatkan masyarakat umum sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai Program Keluarga Harapan, Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam proses penyalurannya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan adanya verifikasi yang dilakukan oleh pendamping PKH, dengan adanya Program Keluarga Harapan ini telah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, dari pelayanan yang diterima mulai dari pelayanan kesehatan dan pendidikan, sehingga masyarakat miskin bisa meningkatkan kemandirian dan mengurangi beban mereka dalam mendapatkan akses dibidang kesehatan dan pendidikan, namun terjadinya kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat karena kurangnya pengetahuan KPM PKH tentang prosedur PKH, kurang terlibatnya masyarakat umum dalam sosialisasi yang dilakukan pendamping PKH sehingga masyarakat tidak paham mengenai bantuan tersebut dan yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkannya.

Kata Kunci : *Implementasi, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kita masih dapat menghirup udara dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Penulis bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena telah diberikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**

Shalawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wassallam. Seorang Pemimpin Revolusioner yang merevolusi dunia dengan ajaran Islam Rahmatan Lil Alamin yang dibawanya. Semoga kita semua tetap istiqomah mengikuti ajaran yang beliau bawa.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang akan datang ataupun orang-orang yang membutuhkannya kelak untuk kegiatan riset akademik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak kendala dan cobaan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta atas Ridho Allah SWT dan kedua orang tua, segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Yulizar dan Ibunda Siti Fatimah beserta saudara penulis Yuni, Irwan, Vera, Kayla, ipar saya Herdianto, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, mensupport, membimbing dan senantiasa menitipkan nama ananda dalam setiap do'anya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag, selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan semoga di era kepemimpinan Bapak, Fekonsos bisa bertambah maju dan jaya, Aamiin.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Ibu Dr. Jhon Afrizal, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Abdiana Ilosa S.AP,M.PA selaku Penasihat Akademik yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis.
7. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan saran, nasehat, dan motivasi selama pembuatan skripsi. Semoga Bapak selalu sehat dan selalu dalam naungan Allah SWT, Aamiin.
8. Bapak dan Ibu Dosen selingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terkhususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah mendidik penulis dari semester awal hingga semester akhir ini.
9. Ketua Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan Ketua Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

beserta karyawan yang telah mengizinkan penulis untuk membaca dan meminjam buku yang ada dipustaka.

10. Seluruh Pegawai UPTD Sosial kecamatan Suliki bidang UPPKH kecamatan yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan dan sepenanggungan Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2016 terkhususnya teman-teman di Kelas E yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas persaudaraan yang telah kita jalin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa masih ada kekurangan dan hal yang perlu diperbaiki. Maka dari itu penulis berharap pada siapapun yang membaca skripsi ini agar dapat kiranya memberikan kritik dan saran yang membangun guna terciptanya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini dapat diterima disisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan setiap desahan nafas kita dan disetiap aliran darah kita dapat bernilai keberkahan sehingga kehidupan kita senantiasa dihiasi dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga rasa sabar selalu diberikan-Nya kepada kita jua. Amin Ya Rabbal Aalamiin.

Pekanbaru, November 2020

NADIA YULIANI
NIM. 11675202166



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Kegunaan Penelitian	18
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Teori Kebijakan Publik.....	20
2.1.1 Proses Kebijakan Publik	27
2.2 Konsep Implementasi	29
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	30
2.4 Konsep Kemiskinan.....	31
2.5 Program Keluarga Harapan (PKH)	33
2.5.1 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	36
2.5.2 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	37
2.5.3 Manfaat Program Keluarga Harapan	38
2.5.4 Kewajiban Peserta PKH.....	38
2.5.5 Mekanisme Pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH)	40
2.6 Konsep Islam	40
2.7 Kerangka Pemikiran	42
2.8 Penelitian Terdahulu.....	43
2.9 Defenisi Konsep	46
2.10 Konsep Operasional.....	46

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	49
3.2.1 Waktu Penelitian	49
3.2.2 Tempat Penelitian	49
3.3 Jenis dan Sumber Data	49
3.3.1 Data Primer	49
3.3.2 Data Skunder	50
3.4 Subjek Penelitian/Informan Penelitian	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	51
3.6 Teknik Analisis Data	52

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Padang Mutung	54
4.2 Profil Desa Padang Mutung	54
4.3 Letak Geografis dan Demografis	55
4.4 Agama.....	56
4.5 Pendidikan	57
4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	57
4.7 Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	58
4.8 Program Kerja Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat terhadap Kesehatan Masyarakat (PAMSIMAS).....	59

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar..	60
5.1.1 Penetapan Keluarga Penerima Manfaat	61
5.1.2 Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH	71
5.1.3 Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH	77
5.2 Faktor-Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	86
6.2 Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Besaran Bantuan Tunai Penerima PKH	13
Tabel 1.2	Data Keluarga Miskin Kecamatan Kampar	15
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Dengan Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	16
Tabel 2.1	Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH.....	39
Tabel 2.2	Indikator Penelitian	47
Tabel 3.1	Key Informant Penelitian	51
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Desa Padang Mutung	55
Tabel 4. 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Desa Padang Mutung	56
Tabel 4. 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Padang Mutung	56
Tabel 4. 4	Jumlah Sarana Ibadah di Desa Padang Mutung	56
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Padang Mutung	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jadwal Untuk Verifikasi KPM PKH.....	11
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Desa Padang Mutung Tahun 2018	57
Gambar 5.1	Contoh Formulir Verifikasi Kesehatan Peserta PKH	75
Gambar 5.2	Contoh Verifikasi Pendidikan Peserta PKH	82
Gambar 5.3	Contoh verifikasi yang dilakukan oleh Pendamping PKH untuk setiap kewajiban yang dilakukan oleh peserta PKH ...	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus Pengembangan Kebijakan di Bidang Perlindungan Sosial, tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Bantuan Tunai Bersyarat atau disebut dengan Conditional Cash Trasfers (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi Negara-negara tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada tingkat Kabupaten dimulai pada tahun 2007, di tingkat Kecamatan dan Desa pada tahun 2011. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Program Keluarga Harapan (Pedoman Umum PKH: 2012) merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan bersyarat dan disesuaikan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kesambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MDGs). Setidaknya ada 5 komponem tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu. Dengan PKH diharapkan Peserta PKH (selajutnya disebut Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) memiliki akses yang sangat baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidak berdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban yang dibidang kesehatan dan pendidikan. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita. Di bidang pendidikan kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan anak kesekolah dasar dan lanjutan (SD s.d SLTP/SMP).

Program Keluarga Harapan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Berdasarkan Pasal 6 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, penerima bantuan sosial PKH berhak mendapatkan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bantuan Sosial PKH berupa uang, barang, atau jasa;
2. Pendampingan Sosial;
3. Pelayanan di Fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial; dan
4. Program Bantuan Komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam Pasal 7 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang PKH, keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban:

1. Keluarga Penerima manfaat PKH Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak balita berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak berusia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
3. Mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
4. Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses berkewajiban:
 - a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan khusus dan/atau petugas pelayanan kesehatan yang disetarakan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak balita berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;

- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan khusus bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. Memberikan perawatan terhadap anggota keluarga lanjut usia dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan Pasal 3 Permensos RI No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan sasaran penerima bantuan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 5 Permensos RI No. 10 Tahun 2017 Kriteria komponen kesehatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 meliputi:

1. Ibu hamil/ menyusui; dan
2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

Kriteria Komponen Pendidikan meliputi:

- a. Anak SD/MI atau sederajat;
- b. Anak SMP/MTS atau sederajat;
- c. Anak SMA/MA atau sederajat.
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. \

Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun; dan
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan Pasal 25 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan bahwa Pelaksana Program Keluarga Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sintang Syarif Kasim Riau

dilakukan oleh dinas/instansi sosial tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi bantuan sosial Program Keluarga Harapan, perlindungan, dan jaminan sosial. Pelaksana Program Keluarga Harapan daerah kabupaten/ kota dalam Pasal 25 ayat (4) bertugas:

1. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan;
2. Melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan;
3. Memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan sesuai dengan rencana;
4. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang timbul di lapangan;
5. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan; dan
6. Melaporkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan daerah kabupaten/kota kepada pelaksana Program Keluarga Harapan provinsi dengan tembusan kepada pelaksana Program Keluarga Harapan daerah pusat yang terdapat dalam Pasal 41 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan dalam Pasal 25 ayat (4) Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan tersebut, sebagaimana yang dimaksud sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan daerah Kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Penetapan lokasi Program Keluarga Harapan;
2. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH);
3. Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan;
4. Verifikasi komitmen kewajiban keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
5. Transformasi kepesertaan program keluarga harapan;
6. Pengakhiran bantuan sosial program keluarga harapan dan pendampingan. PKH akan memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk jangka pendek, PKH akan memberikan income effect kepada RTSM/KSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect anak keluarga miskin (serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect)). Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendanya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun.

Masih banyaknya RTSM/KSM yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik pada sisi RTSM/KSM (demand side) maupun sisi pelayanan (supply side). Pada sisi permintaan, alasan tersebar untuk tidak melanjutkan sekolah karena

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak adanya biaya, berkerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah cukup, dan alasan lainnya. Demikian juga halnya untuk kesehatan, RTSM/KSM tidak mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota keluarga akibat rendahnya tingkat pendapatan. Sementara itu permasalahan pada sisi pelayanan (supply side) yang menyebabkan rendahnya akses RTSM/KSM terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah belum tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh RTSM/KSM. Biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh RTSM/KSM serta jarak antar tempat tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh merupakan tantangan utama bagi penyedia pelayanan pendidikan dan kesehatan dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM/KSM memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku RTSM/KSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah RTSM/KSM yang berkerja. Sebaliknya, hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, dimanapun mereka berada. Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah anak khususnya SD dan SMP.

Menurut BPS masih terdapat banyak anak usia sekolah yang tidak berada dalam sistem sekolah. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi anak dalam sekolah maka keikutsertaan mereka yang berada diluar sistem sekolah harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

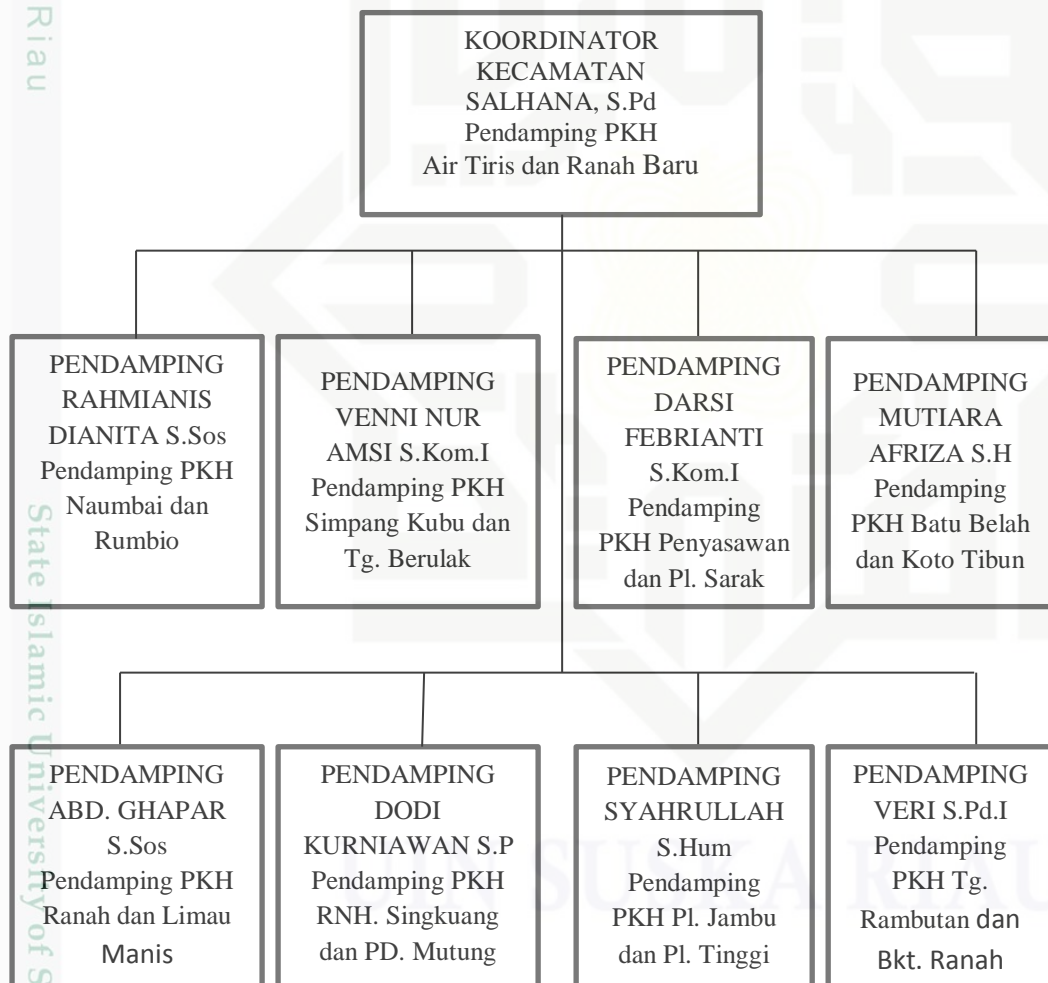
ditingkatkan. Sebagian besar dari mereka yang tidak berada dalam sistem sekolah biasanya berkerja untuk membantu kehidupan keluarga. PKH merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan beberapa sektor yang dalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen lembaga/istansi terkait yang meliputi: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BPS, dan PT Pos Indonesia dan lembaga Keuangan perbankan dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH. Peran Pemerintahan Daerah (pemda) dalam memastikan kesediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan pendidikan sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan PKH ini sesuai komitmen yang sudah ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah. Bantuan yang disalurkan kepada peserta PKH bersumber dari APBN, dan untuk kelancaran pelaksanaan di Kabupaten Kota diperlukan dukungan APBD untuk kelancaran kegiatan dan Pelaksanaan PKH. Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) hingga tahun 2015 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam upaya memutus rantai kemiskinan bagi RTSM dimana kepesertaan PKH tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima PKH saja, tetapi perubahan pola hidup dan perilaku yang menyangkut pendidikan dan perbaikan kesehatan dapat berdampak luas kepada masyarakat di wilayah dilaksanakannya program PKH. Dalam pelaksanaannya peserta yang menerima dana PKH akan menerima bantuan selama maksimal enam tahun. kualitas hidupnya.

Faktor penting penunjang berjalannya program PKH yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap RTSM yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas Penerima dana PKH merupakan RTSM yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampingan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan RTSM agar tepat dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

STRUKTUR PENDAMPING PKH KECAMATAN



Sumber : Kantor Camat Kampar Tahun 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendampingan merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara rutin antara pendamping dengan rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima dana PKH. Efektivitas komunikasi antara kedua aktor tersebut menjadi sangat penting untuk dilihat karena komunikasi yang efektif di antara kedua aktor tersebut memungkinkan terjadinya perubahan pada diri penerima dana tersebut yang mengarah kepada perubahan yang positif dalam hal pengetahuan, sikap serta tindakan terkait pendidikan dan kesehatan. Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan:

1. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar.
2. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak.
3. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi Ibu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamil. Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan (Pedoman Umum PKH: 2012).

Gambar 1.1
Jadwal Untuk Verifikasi KPM PKH



Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019

Verifikasi komitmen KPM PKH merupakan kegiatan untuk memastikan anggota keluarga terdaftar dan hadir memenuhi persyaratan program pada faskes, fasdik, dan faskesos. Pendamping sosial PKH melakukan verifikasi komitmen untuk mencatat tingkat kehadiran anggota KPM pada setiap faskdik, faskes, atau faskesos sesuai dengan protokol masing-masing komponen.

Transformasi Kepesertaan PKH merupakan proses pengakhiran masa kepesertaan KPM PKH berdasarkan hasil kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi. Kegiatan tersebut merupakan proses pendataan ulang dan evaluasi untuk menetapkan status kepesertaan dan sosial ekonomi KPM PKH, yaitu transisi atau graduasi.

Transisi: kondisi KPM PKH yang masih memenuhi persyaratan program, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin. KPM PKH dengan status

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transisi masih diberikan penambahan waktu sebagai KPM PKH, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Graduasi: terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi. Graduasi alamiah: berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan program. Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi: berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH karena tidak lagi berstatus ekonomi miskin meskipun masih memiliki kriteria komponen. Kemensos melalui Dit-JSK dapat bekerja sama dengan lembaga terkait dalam menyediakan dan melaksanakan program bagi KPM dengan status graduasi. Kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi dapat diselenggarakan oleh Kemensos bekerja sama dengan lembaga lain dan dapat dibantu oleh Pendamping Sosial PKH dan Administrator Pangkalan Data di daerah.

Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan). Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat melanjutkan pendidikan keseluruhan dalam rangka untuk melanjutkan pendidikan anak.

Adapun besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau KPM peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Besaran Bantuan Tunai Penerima PKH

Skenario Bantuan	Jumlah Bantuan
Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp 2.400.000
Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp 2.400.000
Bantuan peserta pendidikan setara SD/ sederajat	Rp 900.000
Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ sederajat	Rp 1.500.000
Bantuan peserta pendidikan serta SMA/ sederajat	Rp 2.000.000
Bantuan penyandang Disabilitas Berat	Rp 2.400.000
Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp 1.390.000

Sumber : Buku Pedoman Umum Pelaksana PKH 2019

Berdasarkan tabel diatas, bantuan Terkait kesehatan berlaku bagi RTSM/KSM dengan dibawah 6 tahun dan/ibu hamil/nifas. Besar bantuan tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Khusus untuk jumlah komponen pendidikan perhitungan bantuan memperhitungkan jumlah anak usia sekolah dengan batasan bantuan maksimal. Besar bantuan yang diberikan adalah 16% dari rata-rata pendapatan RTSM/KSM pertahun. Batas minimum dan Maksimum adalah antara 15-25% dari pendapatan rata-rata RTSM/KSM pertahun. Adapun peraturan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemerintah Indonesia no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan mengeluarkan langkah-langkah penangan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
2. Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan indikator PERMENSOS Nomor 146 Tahun 2013 kemiskinan

Salah satu sumbu kenaikan angka kemiskinan di desa antara lain, rendahnya tingkat pendidikan, banyak yang jadi buruh tani karena ketiadaan lahan dan banyaknya anak dalam satu keluarga. Untuk tahun 2011, sebaran angka kemiskinan berjumlah 63,2 % ada di desa, sedang 36,8 % berada di perkotaan. Kemiskinan di perkotaan disebabkan, lowongan kerja sempit dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu, langkah baiknya jika prioritas pembangunan di arahkan ke desa. Selain memang kuantitas angka kemiskinan dan keluarga pra sejahtera masih sangat tinggi, juga karena di desa juga kaya dengan sumber daya alam yang belum tergarap dengan maksimal. Dengan begitu, pengangguran yang memicu angka kemiskinan dapat ditekan. Sehingga dapat

meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, serta mengentaskan dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera (Pedoman Umum PKH: 2012).

Berikut jumlah penduduk berdasarkan Desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 2019.

Tabel 1.2 Data Keluarga Miskin Kecamatan Kampar

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Desa)	JUMLAH PENDUDUK (KK)	KELUARGA MISKIN (KK)
1.	Desa Batu Belah	2.553	816	275
2.	Desa Tanjung Berulak	1.290	424	180
3.	Desa Penyasawan	2.174	554	118
4.	Desa Rumbio	2.087	622	140
5.	Desa Padang Mutung	3.432	997	332
6.	Desa Pulau Kambu	4.641	1.422	250
7.	Desa Simpang Kubu	4.823	1.078	300
8.	Desa Naumbai	1.904	499	318
9.	Desa Limau Manis	1.543	390	149
10.	Desa Ranah Singkuang	1.556	438	303
11.	Desa Pulau Tinggi	2.684	721	112
12.	Desa Bukit Ranah	8.654	2.219	198
13.	Desa Pulau Sarak	3.168	730	105
14.	Desa Koto Tibun	3.275	982	230
15.	Desa Ranah	2.226	617	183
16.	Desa Tanjung Rambutan	1.686	502	162
17.	Kelurahan Air Tiris	6.633	788	268
18.	Desa Ranah Baru	1.537	342	109

Sumber : Kantor Camat Kampar 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Padang Mutung jumlah penduduk miskin sangat tinggi yaitu 332 berdasarkan KK dengan jumlah penduduk sebanyak 3.432 jiwa dan disusul oleh Desa Naumbai dengan jumlah penduduk miskin yaitu 318 Kartu Keluarga dengan jumlah penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 499 Kartu Keluarga masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kecamatan Kampar.

Sedangkan tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Demikian dengan keadaan kehidupan masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Dimana sangat memerlukan bantuan Program Keluarga Harapan untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin. Adapun Rumah Tangga Sangat Miskin yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Dengan Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

No	Jumlah Kk	Jumlah Penduduk			Miskin		% Kemiskinan		Penerima PKH
		Lk	Pr	Jumlah	KK	Jiwa	KK	Jiwa	
1.	997	175 5	16 77	3432	332	1044	35%	32%	151 kk

Sumber : Kantor Desa Padang Mutung 2019

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk di Desa Padang Mutung 997 KK dan yang tergolong dalam keluarga miskin sebanyak 332 KK sedangkan yang mendapatkan program bantuan PKH sebanyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

151 KK. Karena tingginya angka kemiskinan maka pemerintah membuat program PKH. Bantuan PKH seharusnya bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan sehingga mereka benar-benar bisa tertolong dari kemiskinan. Sehingga anak-anak mereka bisa melanjutkan sekolah.

Mengenai kevalidatan data kelayakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), karena pendataan dan penentuan prioritas sasaran dan program ini belum tepat sasaran. Pendataan RTSM yang dilakukan oleh pihak BPS hanya menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2016. Sehingga pendamping sampai saat ini masih mempertanyakan hal tersebut.

Adapun permasalahan yang ada di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar :

1. Belum meratanya penerimaan bantuan PKH. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
2. Kurangnya pengawasan mengenai Program Keluarga Harapan, sehingga ada keluarga yang sangat membutuhkan bantuan PKH tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Seharusnya Program Keluarga Harapan benar-benar memberikan bantuan kepada rumah tangga yang sangat membutuhkannya.

Sehingga fungsi program tersebut benar-benar bisa telaksana sesuai dengan prosedurnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik serta melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor-faktor hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat masukan bagi masyarat dalam menghadapi permasalahan yang ada, dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan proposal, yang antara lain berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan definisi, konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari: Buku, Review, Jurnal, Publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian-kajian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Menguraikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, dan struktur organisasi objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan sosial salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur kesejahteraan sosial. Sebagaimana dijelaskan pada pengantar, makna “kebijakan” pada kata “kebijakan sosial” adalah “kebijakan publik”, “sedangkan makna “sosial” menunjuk pada bidang kesejahteraan. Bagian ini menjelaskan konsep-konsep mengenai kebijakan public dan beberapa aspek yang terkait dengannya. Bahasan mengenai apa saja yang termasuk dibidang kebijakan sosial dan kesejahteraan sosial.

Menurut Ealau dan Pewitt (dalam Nugroho Riant: 2009) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, di cirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Titmuss (dalam Nugroho Riant: 2009) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (dalam Nugroho Riant: 2009) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain 3 teori diatas kebijakan pun dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu:

1. Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah
3. Teori Elit memandang Kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
4. Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap
5. Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
6. Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing. Teori kebijakan yang lain adalah Teori Campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan incremental.

Ada dua akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu: kebijakan yang berorientasi pada pelayanan public dalam arti sesuai dengan makna demokrasi dan kebijakan yang meracuni public / kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini sangatlah kontra produktif terhadap nilai-nilai demokrasi. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; Pembuatan Peraturan UU, Perencanaan Kegiatan, Aneka intervensi terhadap ekonomi/social masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja arti dalam government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendisbusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya.

Kebijakan Publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan, termasuk dalam bidang kebijakan publik. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan merumuskan tujuan-tujuan. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Misalnya, sebuah kebijakan yang tidak memiliki tujuan yang jelas, program-program akan diterapkan secara berbeda-beda, strategi pencapaiannya menjadi kabur, dan akhirnya para analis akan menyatakan pemerintah telah kehilangan arah (Edi Suharto: 2011).

Dalam kenyataannya, pembuat kebijakan sering kali kehilangan arah dalam menetapkan tujuan-tujuan kebijakan. Solusi kerap kali sebaliknya, dimana sebuah solusi yang baik yang akan gagal jika diterapkan pada masalah yang salah (suharto, 2006). Kebijakan yang baik dirumuskan berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat. Tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan juga biasanya melenceng dikarenakan adanya akibat-akibat yang terjadi diluar perkiraan. Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai respon atau tanggapan resmi terhadap isu atau masalah publik. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik mencakup:

1. Tujuan, Kebijakan publik senantiasa menyangkut pencapaian tujuan pemerintah melalui penerapan sumber-sumber publik.
2. Keputusan, Pembuatan keputusan-keputusan dan pengujian konsekuensi konsekuensinya.
3. Struktur, Tersruktur dengan para pemain dan langkah-langkahnya yang jelas dan terukur.
4. Tindakan, Tindakan yang bersifat politis yang mengekspresikan pemilihan program-program prioritas lembaga eksekutif.

Visi pembangunan kesehatan kedepannya adalah “Indonesia sehat”. Untuk mewujudkan kesehatan tersebut maka misi pembangunan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesehatan dan gizi yang optimal melalui terciptanya masyarakat dan bangsa, yang ditandai oleh penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata diseluruh wilayah Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut, dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut.

1. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Artinya program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan harus memberikan kontribusi yang positif terhadap kesehatan.
2. Profesionalisme tenaga kesehatan. Untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional harus didukung oleh sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Kemandirian masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat perlu ditingkatkan dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan berupa mobilisasi sumber dana masyarakat yang berperan besar dalam pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Desentralisasi. Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan, desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan kesehatan akan lebih ditingkatkan.

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,
- 2) Undang-undang/peraturan, pemerintah pengganti undang-undang,
- 3) Peraturan pemerintah,
- 4) Peraturan presiden
- 5) Peraturan Daerah.

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (Nugroho 2009), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut Thomas R.Dye (Leo Agustino 2012), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan Publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pertanyaan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Shfritz dan Russel (Abidin, Said Zaina 2012), mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut “is whatever goverment dicides to do or not to do”. Chadhler dan Plano mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan proses terhadap suatu isu politik. Sedangkan menurut Chaizi Nasucha (Nugroho Riant 2009) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Pembuatan kebijakan
2. pelaksanaan dan pengendalian, serta
3. Evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (Nugroho Riant 2009), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

1. Penyusunan agenda
2. Formulasi kebijakan
3. Aopsi kebijakan
4. Implementasi kebijakan
5. Penilaian kebijakan.

2.1.1 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah publik. Proses kebijakan publik menurut Dunn dalam Suharno (2013:22-23) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda
2. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.

Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama Formulasi Kebijakan Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi/Penilaian kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Sedangkan Anderson dalam Suharno (2013:25-26), sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (problem formulation)

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk agenda pemerintahan. Formulasi kebijakan (formulation) Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif- alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

2. Penentuan kebijakan (adaption)

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

Implementasi (implementation)

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

Evaluasi (evaluation)

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

2.2 Konsep Implementasi

Menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah, “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64). Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut, “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70).

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan

pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39). Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh setiawan tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut, “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program” (Harsono, 2002:67). Merilee S. Grindle dalam Nugroho mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation), (Merilee S. Grindle dalam Nugroho 2003: h. 167).

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan dan kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Menurut (sumodiningrat,2007:107) pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.

Kedua meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. Ketiga, melindungi/memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. (Suharto,2009)

Menurut Sudarwati dalam Kartasasmita (2006, h.22), kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

2.4 Konsep Kemiskinan

Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2017:27) menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan (welfare) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(powerless), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantungan tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Lebih lanjut, Sulistiyani (2017:27-28) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.

Peneliti menyimpulkan, kemiskinan sebagai suatu kondisi seseorang maupun kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya, tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, sehingga jauh dari kehidupan sejahtera.

Indikator-indikator masyarakat miskin pada dasarnya terdiri dari keluarga yang tingkat pendapatan dan penghasilan ekonominya adalah relative rendah. Permennsos Nomor 146 Tahun 2013 Yang disebut masyarakat miskin dilihat dari beberapa indicator yaitu :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sitarak Kasim Riau

2.5

Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan, pereko-nomian, dsb. Jones dalam Arif Rohman (2009, h.101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan income effect kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga.

Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (insurance effect). Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan,

Menurut kementerian Sosial RI Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga Penerima Manfaat PKH. Didalam Permensos RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial.
Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.

2. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 3: “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.”, Pasal 15: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”, Pasal 16: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden”. Pasal 13: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
6. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (Munawwarah Sahib. 2016 : 26).
7. Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
8. Permensos No. 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.
9. SK dirjen No.12/LJS.SET.OHH/09/2016 Tentang Pedoman Umum PKH
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No:31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan.

2.5.1 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan RTSM/KSM.
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.

Program yang mengintervensi sisi supply dan demand, dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintah, serta antar pemangku kepentingan (stakeholders). Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan PKH harus bisa di buktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa di pertanggungjawabkan. Investasi di PKH sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan bangsa dan penanggulangan kemiskinan.

2.5.2 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di laksanakan secara berkelanjutan yang dimulai dengan uji coba di 7 Provinsi pada tahun 2007. Uji coba ini dimaksudkan untuk menguji instrumen terkait dan diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain Metode penentuan sasaran, validasi data, verifikasi, persyaratan mekanisme pembayaran, pengaduan masyarakat, proses pendampingan, dan lain-lain. Pada tahun 2012, PKH telah disepakati menjadi Program nasional, yaitu:

1. PKH telah menjangkau seluruh Provinsi di Indonesia
2. Pelaksanaan PKH dilakukan secara bersama-sama oleh masing-masing kementerian dan lembaga.

Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan terus dilaksanakan hingga tahun 2015 sesuai dengan target dan komitmen pencapaian MDGs. Selama periode ini, target penerima PKH akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencakup seluruh RTSM/KSM.

2.5.3 Manfaat Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka pendek memberikan efek pendapatan (income effect) kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, dan dalam jangka panjang seperti telah dikemukakan, dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga miskin) memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect).

2.5.4 Kewajiban Peserta PKH

Ada beberapa kewajiban peserta PKH yang harus dipenuhi sebagai peserta PKH, meliputi:

1. Berkaitan dengan kesehatan
 - a. Peserta PKH yang telah memiliki kartu PKH, wajib ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan pada tabel 2.1
 - b. Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH

Anak usia 0-6 tahun :

- a. Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- b. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- c. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus.
- d. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- e. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program
- f. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD

Ibu hamil dan ibu nifas :

- a. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- b. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan / medis.
- c. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan

Sumber: Buku pedoman umum PKH

2. Berkaitan dengan pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan Pendidikan jika memiliki anak berusia -7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila anak yang berusia 5-6 tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan seperti anak PKH lainnya.

2.5.5 Mekanisme Pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada RTSM/KSM yang telah dipilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam PKH. Pembayaran bantuan dilakukan oleh lembaga pembayaran yang ditunjuk setiap tiga bulan pada tanggal yang telah ditentukan oleh UPPKH Pusat untuk masing masing kabupaten/kota. Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI).

2.6 Konsep Islam Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang senantiasa eksis dimana-mana dan kapan saja. Al-Qur`an menjelaskan hal ini dalam surat An-Nahl (16): 71,

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Artinya : *dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah*

Kemiskinan adalah musibah yang harus dihapuskan dari masyarakat.

Sebab konsekuensi kemiskinan adalah kekafiran yang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Maka Islam dengan tegas melarang seorang muslim berpangku tangan, bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu, atau melakukan hal-hal yang tidak produktif.

Dalam Islam jaminan sosial itu berarti, “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan menghindarkan keburukan dari mereka. Namun, harus diingat jika membahas takaful dalam Islam adalah bahwa takaful mencakup orang yang membutuhkan yang telah mengerahkan segala upayanya tetapi tidak bisa merealisasikan kecukupannya.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

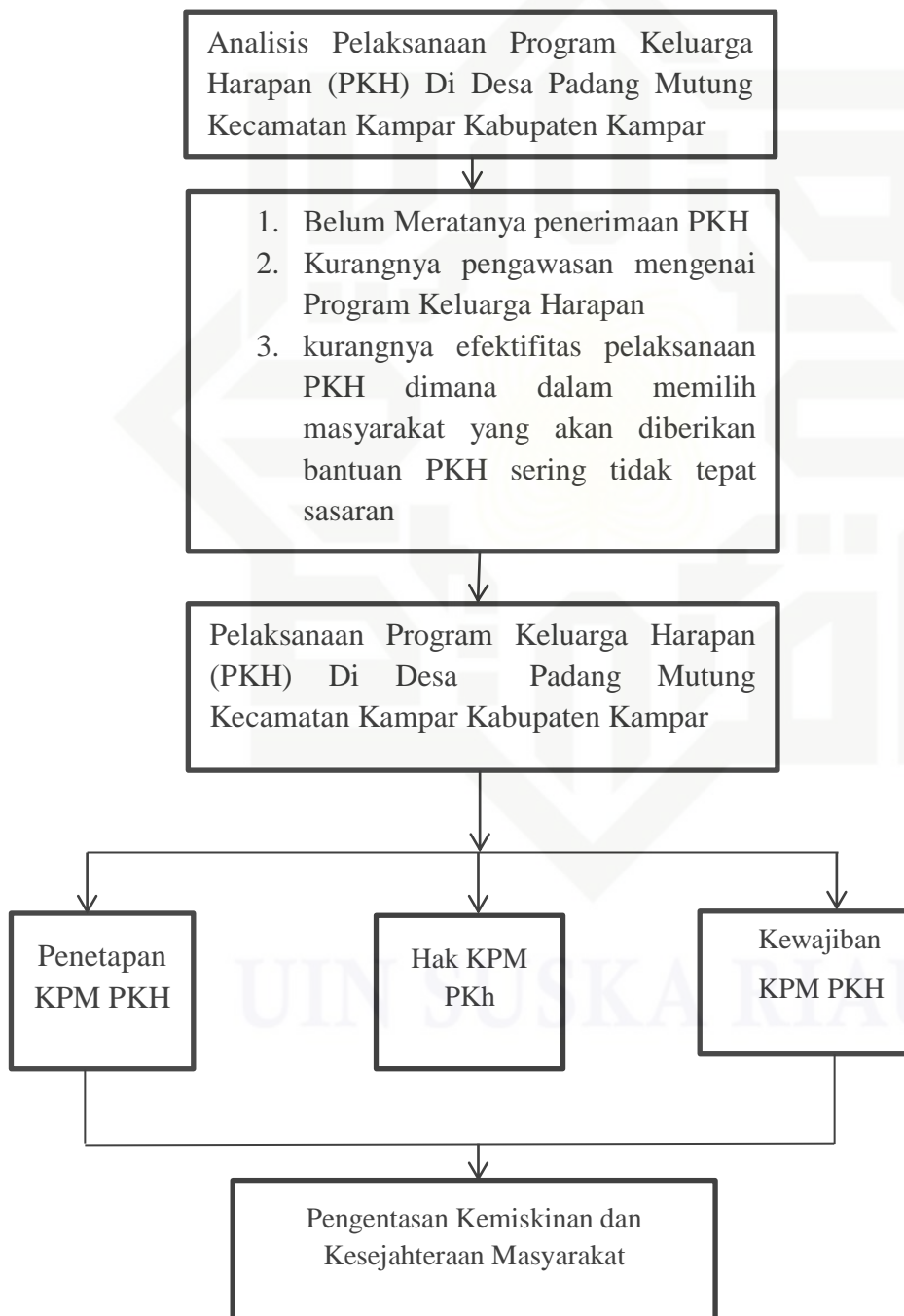
Artinya : *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”*
(Q.S Al-maidah : 2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat diatas jelas bahwa Allah SWT memerintahkan agar memberikan haknya kepada orang miskin yang mana hartanya tersebut harus kita salurkan kepada yang membutuhkan. Ayat diatas juga mempunyai konsep bahwa kita harus menyalurkan sesuatu harus tepat pada sasarannya.

2.7 Kerangka Pemikiran



2.8 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Cristanti Desi Binarika (2012) yang meneliti tentang” Partisipasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pendidikan Di Kelurahan Lestari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban”. Menunjukkan bahwasanya partisipasi RTSM dalam PKH Kelurahan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban menunjukkan bawasanya anak-anak peserta PKH Pendidikan menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan sistem yang berlaku di sekolah, dan hampir seluruh anak melanjutkan pendidikannya kejenjang berikutnya. Anak-anak peserta PKH yang telah terdaftar tetap mengikuti program pendidikannya sampai selesai. Dan partisipasi kehadiran anak RTSM peserta PKH Pendidikan di sekolah sudah sesuai dengan syarat kehadiran yaitu minimal 85%.

Sedangkan menurut Ahmad Rokhuol Alamin (2012) yang meneliti tentang “Analisis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Jakarta Utara”. Menunjukan bahwasanya berdasarkan analisis peran pendamping PKH untuk mengupayakan agar masyarakat memiliki keberdayaan diri dalam membangun, mengembangkan, dan membina kehidupannya secara respontif (tanggung jawab) terhadap problem sosial apapun yang tengah mereka hadapi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Azmi Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau (2018) tentang Analisis Fungsi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Meranti dengan permasalahan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi program keluarga harapan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sangat miskin. hasil penelitian bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari seluruh aspek kurang berfungsi dengan baik khususnya dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM. Adapun perbedaan dengan skripsi saya adalah lokasi penelitian, Teknik Pengumpulan Data saudara Muhammad Nur Azmi menggunakan Kuantitatif dan Saya Kualitatif dan untuk teknik penentuan sumber data saya menggunakan teknik purposive sampling sedangkan saudara Nur Azmi dengan populasi dan sampel.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melviona Mahasiswa Universitas Negeri Riau (2017) tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indagiri Hulu dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indagiri Hulu, menyatakan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya optimal dan masih banyak kendala-kendala yang terjadi, kemudian faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harpan (PKH) ini yaitu

partisipasi, sarana dan prasarana. Adapun perbedaan dengan skripsi saya adalah untuk lingkup kajian saudara Melviona lebih luas yakni Kecamatan sedangkan penelitian saya yang memfokuskan terhadap satu Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Ridho Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau (2019) tentang Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota dengan permasalahan bahwasanya PKH tidak diterima oleh Keluarga yang benar-benar membutuhkan dilihat dari data pemohon PKH sangat banyak dan yang mendapatkan hanya sedikit kemudian tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai Program Keluarga Harapan, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Limapuluh Kota dan apa saja Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Limapuluh Kota hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota sudah berjalan dengan cukup baik walaupun belum optimal dalam segi penetapan keluarga penerima manfaat (KPM). Perbedaan dengan penelitian saya penelitian saya adalah lokasi penelitian, Teknik Pengumpulan Data saudara Ridho menggunakan Kuantitatif dan Saya Kualitatif dan untuk teknik penentuan sumber data saya menggunakan teknik purposive sampling sedangkan saudara ridho dengan populasi dan sampel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Defenisi Konsep

Adapun defenisi yang di ajukan dengan penelitian ini adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri Singarimbun, 1989: 33).

1. Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan di tetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
3. Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Masri Siangarimbun, 1989:46) sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja sebagai pendukung nya untuk di analisa dari variabel tersebut. Indikator-indikator untuk melakukan pengukuran kebijakan program keluarga harapan adalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	1. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat	1. Pendataan KPM PKH 2. verifikasi Data KPM PKH
	2. Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH	1. Menerima bantuan uang tunai. 2. Menerima pelayanan kesehatan 3. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak
	3. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH	1. Pemeriksaan Persyaratan Bagi Peserta PKH 2. Persyaratan Pendidikan Bagi Peserta PKH 3. Persyaratan Kesehatan Bagi Peserta PKH

Sumber : Buku Pedoman Umum PKH 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Jenis data dan analisisnya yaitu Data Kualitatif yang merupakan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiono, 2011:14).

Sementara menurut moleong dalam (Moleong, Lexy. J.(2016:11) peneliti kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dan menurut Sarosa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya bukan di dalam laboratorium dan peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Penelitian Kualitatif Diskriptif adalah suatu penelitian yang menggunakan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, sehingga bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis dalam memperlakukan kelompok yang berkebutuhan Yaitu data khusus/ disabilitas sebagai mana hak-hak mereka yang telah dijamin oleh undang- undang.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kampar tepatnya di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Adapun penelitian ini dimulai pada Februari 2020 sampai dengan selesai. Alasan penulis melakukan penelitian ini karena penulis menemukan masalah dalam pelaksanaan program keluarga harapan yang yang mana tidak meratanya penerima Bantuan Program PKH, kurangnya pengawasan, dan kurangnya efektifitas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

3.2.2 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan masyarakat Desa Padang Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

3.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian data penelitian di dapat dari wawancara serta pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara seperti wawancara yang peneliti lakukan bersama Camat Kampar Bapak Al Kaushar, 19 Oktober 2020 :

1. Apa yang bapak ketahui mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) ?
2. Bagaimana peran kecamatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Padang Mutung?

3.3.2 Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, hal ini diperoleh dari berbagai sumber baik berupa laporan, maupun informasi dari pihak terkait. Seperti Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2019, Data penduduk di Kecamatan Kampar, jumlah penduduk miskin di Desa Padang Mutung dan Data Pemohon Bantuan PKH.

3.4 Subjek Penelitian/Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2014 : 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diikuti oleh peneliti. Jadi subjek penelitian ini merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Selanjutnya penentuan subjek penelitian atau responden di anggap sebagai key informant dilakukan cara yaitu purposive sampling. Alasan penulis menggunakan dua teknik tersebut karena sumber informant dalam ini terbagi dua pihak, yaitu unit pelaksanaan PKH (UPPKH) Kabupaten Kampar dan Masyarakat yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informant. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemdamping Program Keluarga Harapan, Ketua PKH, dan pihak yang kompeten dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan Sosial Keluarga Harapan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti sugiyono (2016 : 85). Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya mengenai informan atau sampel dan populasi maka dapat dilihat dari key informant dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Key Informant Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Camat Kampar	1
2.	Koordinator PKH Kabupaten Kampar	1
3.	Pendamping PKH	2
4.	Kepala Desa	1
5.	Peserta PKH	6
6.	Masyarakat	2

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan cara :

1. Observasi

Menurut irawan (2004 : 63) observasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dengan dekat keadaan objek penelitian atau mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, penulis menggunakan teknik pengumpulan langsung dengan perilaku manusia serta perlu pengamatan langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dan biasanya seorang informant atau seorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah) pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya disiapkan terlebih dahulu yang diarahkan kepada informasi-informasi untuk topik yang akan digarap. (keraf, 2004:182).

3. Dokumentasi

Yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi, surat-surat, berkas, laporan atau file, yang sifat utamanya tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisa Data Kualitatif yaitu nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka statistik. Jadi data kualitatif adalah data yang berupa kata dan atau kalimat, gambar, skema yang belum diangkakan. Penelitian yang menggunakan data yang bukan dalam skala ratio, tetapi dalam bentuk skala yang lebih, yaitu skala nominal, ordinal ataupun interval yang kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan dan bedakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian . (moleong, lexy J 2016:5).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, diklarifikasi kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan dan jenis data tersebut kemudian dihubung-hubungkan dengan menggunakan pendekatan fungsional. Analisis data ini digunakan untuk menilai menganalisis data yang telah difokuskan dalam penelitian yaitu mengenai Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Padang Mutung

Desa Padang Mutung merupakan gugusan dari kenegerian Rumbio yang merupakan ikatan kemasyarakatan persukuan di Kabupaten Kampar. Kenegerian Rumbio ini telah mewujud sejak zaman Kerajaan Sri Perca (Sriwijaya), hingga pada zaman penjajahan Eropa dan Jepang. Anak kemanakan Kenegerian Rumbio selalu didengungkan istilah Tahan Pancung yang dapat diintegrasikan beragam. Sebelum Indonesia merdeka Rumbio hanya dimaktubkan sebagai sebuah kampung yang dipimpin oleh seorang Wali Negeri. Kemudian pada tahun 1981 Rumbio dipecah menjadi 5 (Lima) desa yaitu Desa Rumbio, Desa Padang Mutung, Desa Alam Panjang, Desa Pulau Payung dan Desa Teratak.

4.2 Profil Desa Padang Mutung

Desa Padang Mutung terletak di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, desa Padang Mutung desa yang dilalui oleh aliran sungai Kampar. Penduduk asli desa Melayu dan sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Mata pencahariannya sebagian besar petani, PNS, pedagang, dan lain-lain. Sedangkan dari potensi desa tentang ketersediaan sarana dan prasarana listrik dan komunikasi sudah sangat memadai, karena desa ini dilintasi oleh jalur utama dari Ibukota Provinsi menuju Ibu kota Kabupaten walaupun jalan desa masih berupa semenisasi dan jalan tanah. Sebagian besar wilayah desa merupakan daerah perkebunan baik berupa kebun warga maupun kebun negara. Sebagian kecil masyarakat memiliki kolam ikan yang pada umumnya menyediakan benih ikan.

4.3 Letak Geografis dan Demografis

1. Geografis

Desa Padang Mutung merupakan desa terluas dari Kecamatan Kampar, terletak pada bujur 17 Km dan lintang atas 3 Km, Tengah 10 Km, dan Bawah 2 Km, luas Desa Padang Mutung dengan luas 9150 Km, dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sungai Kampar
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sei Lipai
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Rumbio dan Desa Pulau Sarak
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Koto Tibun dan Desa Kampar

2. Demografis

Menurut data statistik kantor Kepala Desa Padang Mutung tahun 2017, bahwa jumlah penduduk Desa Padang Mutung berjumlah 3316 jiwa. Pada tahun 2018 berjumlah 3432 yang terdiri dari laki-laki 1755 jiwa dan perempuan 1677 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai penduduk ini akan penulis utarakan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Desa Padang Mutung

NO	Jumlah Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1755
2.	Perempuan	1677
Jumlah		3432

Sumber : Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Desa Padang Mutung

NO	Umur	Jumlah
1.	0-3 Tahun	175
2.	03-05 Tahun	224
3.	05-06 Tahun	99
4	06-12 Tahun	283
5.	12-15 Tahun	203
6.	15-18 Tahun	301
7.	18-60 Tahun	1621
8.	60 Tahun keatas	526
Jumlah		3432

Sumber : Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Padang Mutung

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3405
2.	Katholik	27
3.	Budha	-
4.	Hindu	-
Jumlah		3432

Sumber : Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

4.4 Agama

Seluruh masyarakat Desa Padang Mutung mayoritas beragama Islam yaitu 100% untuk menunjang rutinitas masyarakat dalam menjalankan ibadah sebagai umat beragama masyarakat desa perlu sarana tempat beribadah.

Adapun jumlah tempat ibadah Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 4 Jumlah Sarana Ibadah di Desa Padang Mutung

No	Sarana ibadah	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Mushallah	6

Sumber : Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

4.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, karena maju dan mundurnya suatu negara banyak sekali dipengaruhi oleh sumber daya manusia, dalam hal ini yang paling berperan adalah pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia.

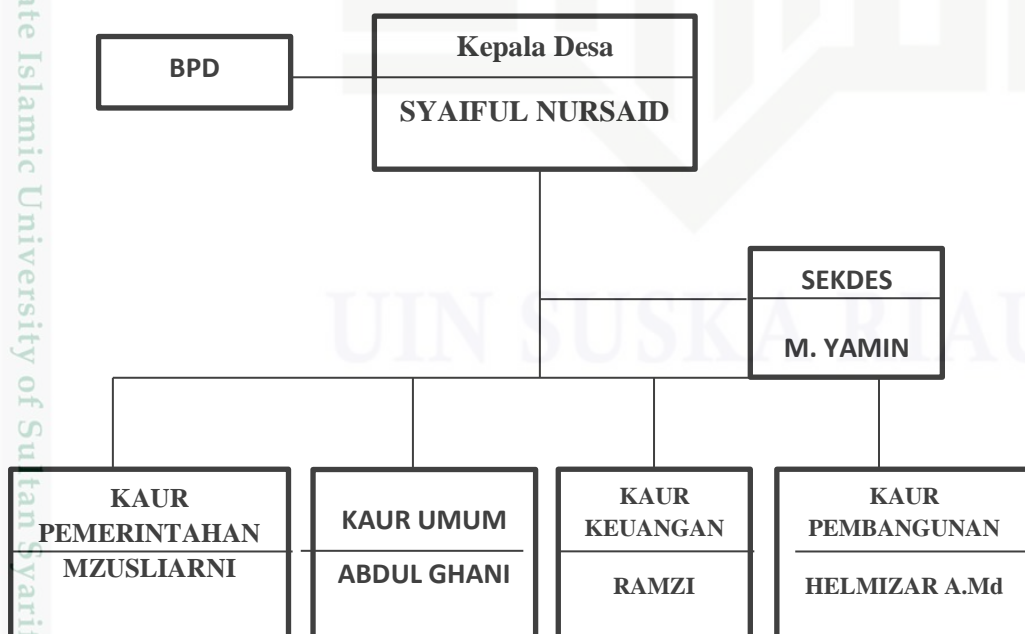
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Padang Mutung

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/Sederajat	505
2.	Tamat SLTP Sederajat	501
3.	Tamat SLTA Sederajat	490
4.	Pondok Pesantren	26
5.	Madrasah	224
6.	Diploma I/II	72
7.	Akademi/Strata I	23
Jumlah		1841

Sumber : Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

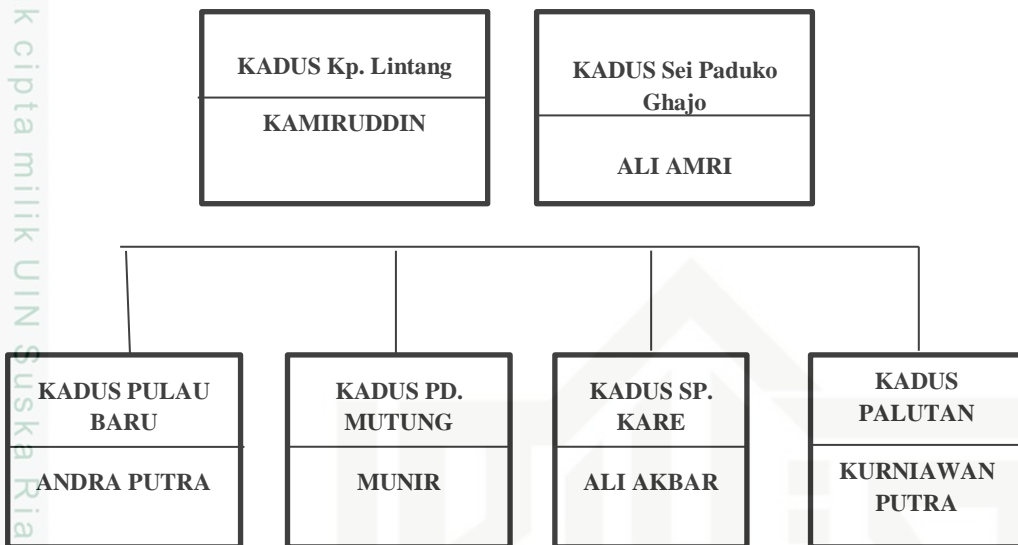
4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Desa Padang Mutung Tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Sumber: Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

4.7 Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Pendekatan Berbasis Masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengoperasian dan pemeliharaan. Proses tersebut mengajak masyarakat untuk menemu-kenali berbagai permasalahan terkait dengan air minum dan sanitasi, kemudian dibimbing untuk melakukan berbagai langkah solusi dan pencegahannya termasuk membangun sarana yang dibutuhkan seperti sarana air minum dan sanitasi serta membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Kegiatan Program Pamsimas mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat ; penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum, serta pengembangan kapasitas pelaku Pamsimas melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Dengan adanya Program Nasional Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Padang Mutung, diharapkan akses untuk mendapatkan air bersih dilingkungan masyarakat semakin meningkat dengan kualitas air yang higienis, serta diiringi dengan adanya perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat kearah perubahan perilaku hidup yang bersih dan sehat (PHBS). Dan adanya Program Pamsimas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sehingga terciptanya taraf hidup masyarakat desa yang madani, mandiri dan mempunyai semangat kegotong royongan yang kuat.

4.8 Program Kerja Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat terhadap Kesehatan Masyarakat (PAMSIMAS)

1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah.
2. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.
3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum.
4. Hibah insentif desa dan kabupaten.
5. Dukungan manajemen pelaksanaan program

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pelaksanaan program dan instansi terkait.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2020 dengan didasarkan pada indikator penelitian Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), di dalam suatu penetapan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Padang Mutung sudah sesuai prosedur tetapi belum berjalan dengan baik, pada penerimaan hak keluarga penerima manfaat sudah sesuai prosedur dan Untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan berjalan lancar karena dipantau langsung oleh pendamping PKH. Dalam penetapan KPM di Desa Padang Mutung tidak transparansi dan belum mendapatkan kepuasan ditengah-tengah masyarakat.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam pelaksanaan Program PKH di Desa Padang Mutung.
 - a. Para Pendamping PKH tidak melibatkan masyarakat umum dalam sosialisasi PKH sehingga banyak masyarakat yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya mendapatkan bantuan PKH namun tidak menerima bantuan.

- b. kurangnya pengetahuan calon KPM PKH tentang prosedur PKH mengakibatkan terjadinya masalah seperti : ketika para calon KPM PKH telah terdaftar menjadi penerima PKH namun saat validasi ternyata tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, seperti harus adanya komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, sehingga terjadilah kecemburuan sosial antara masyarakat tersebut.
- c. terjadinya keterlambatan dalam pencairan uang disebabkan Karena saldo KPM nihil dan juga di karenakan jaringan.
- d. Tidak adanya pendampingan dari Pendamping PKH dalam proses pengambilan uang oleh KPM PKH sehingga untuk pengambilan uang bebas siapa saja dari keluarga KPM

6.2. Saran

1. Melakukan pendataan ulang dari pihak UPPKH-Pusat dengan ikut melibatkan dan memberikan kewenangan campur tangan pendamping Kecamatan dalam memilih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai calon penerima PKH yang sesuai dengan kriteria dengan data yang up to date agar bantuan dapat diterima oleh sasaran yang benar membutuhkan.
2. Adanya mekanisme yang lebih fleksibel untuk melakukan pengajuan tambahan Keluarga Miskin (KM) peserta PKH yang sesuai kriteria, bukan hanya menjadi kewenangan pusat melainkan juga wilayah atau kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kecamatan melalui mekanisme pendataan yang jelas dalam proses pemilihan Keluarga Miskin (KM).

3. Melakukan Sosialisai mengenai PKH juga perlu melibatkan masyarakat Umum agar seluruh masyarakat paham apa itu PKH dan petugas-petugas PKH memahami dan menjelaskan kepada masyarakat proses-proses verifikasi data KPM agar masyarakat memahami dan mengerti sehingga terciptanya transparansi dalam proses pendataan calon KPM. dan pemutakhiran data perlu dilakukan dengan benar, sehingga peserta yang harus mendapatkan sesuai dengan target tujuan program PKH yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Adanya keaktifan setiap komponen yang terlibat dalam menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dalam mendukung jalannya pelaksanaan program, seperti pihak puskesmas, ketua kelompok dan pihak kecamatan.
5. Seharusnya pihak Kecamatan melakukan pengawasan serta memberikan apresiasi lebih terhadap keberadaan program PKH, dengan mendukung implementasinya di kecamatan dan memfasilitasinya dengan sarana prasarana yang memadai seperti memberikan ruangan/bangunan sebagai kantor sekretariat UPPKH-Kecamatan agar masyarakat lebih mudah melakukan pelaporan dan pengaduan menyangkut kendala program.
6. Optimalisasi peran pendamping sesuai tugas dan fungsinya dalam melakukan pendampingan pada KPM yaitu seperti melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan potensi dalam perwujudan dari KM (Keluarga Miskin) menjadi Keluarga Pra Sejahtera hingga keluarga sejahtera.

7. Pendamping PKH sebagai pengawas tingkat Kecamatan yang selalu turun ke Desa untuk melakukan pendampingan dengan Peserta PKH harus benar-benar lebih teliti lagi untuk memantau keadaan Peserta PKH.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Said, Abidin, Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humamika.

Rokhoul, Ahmad, Alamin. 2010. *Analisis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara*.

Leo, Agustino. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.

Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rinneka Cipta.

Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2019

Desi, Cristani Bina Rika. 2012. *RTSM terhadap PKH Partisipasi Didikan Latsari Kecamatan Kabupaten Tuban*.

Lexy, Moleong. J.(2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosda Karya

Nugroho, Riant. 2009. *Public Polici*. Jakarta : Kelompok Gramedia.

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Sosial*.

Husaini, Usman. 2009. *Metodologi Penelian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Pedoman umum PKH 2019

Permensos RI NO 1 Tahun 2018

Jurnal atau Website

Ridho, Rahmat. 2019. Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota.

Muhammad, Azmi Nur. 2018. Analisis Fungsi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara bersama Koordinator PKH Kabupaten Kampar



Wawancara bersama Camat Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala Desa Padang Mutung



Wawancara bersama Pendamping PKH Desa Padang Mutung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama keluarga penerima manfaat (KPM) PKH



Wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama keluarga penerima manfaat (KPM) PKH



Wawancara bersama keluarga penerima manfaat (KPM) PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama keluarga penerima manfaat (KPM) PKH



Wawancara bersama keluarga penerima manfaat (KPM) PKH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2855/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 28 Juli.2020 M
7 Zulhijjah 1441 H

Kepada
Yth. **Rusdi, S. Sos, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Nadia Yuliani
NIM : 11675202166
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/34170
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2723/2020 Tanggal 17 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NADIA YULIANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11675202166 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | DUSUN IV PADANG MUTUNG |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Juli 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR KEPALA DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR

Alamat: Jl. Pekanbaru – Bangkinang KM.43

KODE POS 28461

SURAT KETERANGAN

Nomor : 57 / SKT / X / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NADIA YULIANI
NIM : 11675202166
Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau
Jenjang : S. 1
Alamat : Dusun IV Padang Mutung
Lokasi Penelitian : Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Bahawa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.** Di Desa Padang Mutung terhitung tanggal 15 Oktober 2020 – 05 November 2020.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Dikeluarkan : Padang Mutung
Pada Tanggal : 06 November 2020
KEPALA DESA PADANG MUTUNG



SYAIFUL NURSAID

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KECAMATAN KAMPAR

AIR TIRIS

Kode Pos : 28461

REKOMENDASI

Nomor : 070/ IX / 2020 / 591

TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Camat Kampar di Airtiris, berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2020/560 tanggal 27 Agustus 2020, dengan ini memberikan Rekomendasi Riset kepada :

Nama	: NADIA YULIANI
Nomor Mahasiswa	: 11675202166
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang Pendidikan	: S.1
Alamat	: DUSUN IV PADANG MUTUNG
Judul Penelitian	: "ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
Lokasi Penelitian	: DI DESA PADANG MUTUNG KEC. KAMPAR KAB. KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Riset/Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian/pengumpulan data.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terimah kasih.

DIKELUARKAN DI : AIRTIRIS
PADA TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2020

An. CAMAT KAMPAR
Sekretaris Kecamatan



Drs. H. ALI SASTRO AMIJOYO
PENATA TINGKAT I
NIP. 19640831 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/560

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN RISET/34170 tanggal 22 Juli 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **NADIA YULIANI**
2. NIM : 11675202166
3. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DUSUN IV PADANG MUTUNG
7. Judul Penelitian : **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**
8. Lokasi : DI DESA PADANG MUTUNG KEC. KAMPAR KAB. KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Agustus 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Kepala Kantor UPPKH Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Sdr. Camat Kampar di Air Tiris.
4. Kepala Desa Padang Mutung di Kampar.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Diseluruh kanya tulis ini tanpa nance

Diseluruh kanya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



tamat pada tahun 2016.

Nadia Yuliani, dilahirkan di Desa Padang Mutung pada tanggal 17 Juli 1998. Anak Ketiga dari lima bersaudara merupakan putri dari pasangan Yulizar dan Siti Fatimah, saat ini penulis tinggal di Desa Padang Mutungi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penulis menempuh pendidikan mulai dari TK Pembina Padang Mutung tamat pada tahun 2004, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar 004 Padang Mutung tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Kampar tamat pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke SMAN 1 Kampar Timur yang

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Pada tahun 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bangkinang Kota setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukaramai Kecamatan Tapug Hulu Kabupaten Kampar. Penulis melakukan penelitian di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian tersebut di uji dalam sidang munaqasah (Oral Comprehensif) pada tanggal 28 Desember 2020 dan penulis dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

UIN SUSKA RIAU